



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 40.a/LHP/XIX.KUP/08/2015

Tanggal : 24 Agustus 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan W.J. Lamentik No. 91, Oebobo, Kupang

Telp : (0380) 840600 Fax : (0380) 840601



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2014**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 40.a/LHP/XIX.KUP/08/2015
Tanggal : 24 Agustus 2015



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2014**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan Prinsip Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 9.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 23 Juni 2014, BPK tidak menyatakan pendapat atas Neraca Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per tanggal 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 karena Pemerintah Kabupaten Rote Ndao: 1) belum menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sesuai keberadaannya; 2) belum menyajikan nilai Persediaan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil perhitungan fisik persediaan akhir tahun; 3) belum menyajikan nilai Investasi Non Permanen berdasarkan hasil inventarisasi secara memadai; 4) belum menyajikan nilai Investasi Permanen berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

yang telah diaudit; 5) belum menyajikan nilai Aset Tetap dalam Neraca dengan memadai; 6) belum menyajikan nilai Kewajiban secara lengkap dan belum menelusuri saldo awal atas pungutan pajak yang ditampung dalam rekening titipan sebelum disetor ke Kas Negara; dan 7) belum menyajikan Belanja Barang dengan bukti pertanggungjawaban riil dan lengkap serta terdapat Belanja Perjalanan Dinas yang dibayarkan lebih sebesar Rp673.558.750,00.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan beberapa langkah perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yaitu: 1) menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai keberadaannya dan telah membayarkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai kepada penerima serta mencatat sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah pada akun Piutang Lain-Lain; 2) menyelesaikan Hutang atas kelebihan DPPID dengan mekanisme pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat; dan 3) penyetoran ke Kas Daerah oleh pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp370.165.950,00 atas Belanja Perjalanan Dinas yang dibayarkan lebih.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.I.8) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp11.182.345.450,74 dan sebesar Rp12.826.757.691,28. Nilai Persediaan tersebut belum seluruhnya disajikan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai persediaan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.II.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp14.282.728.261,00 dan sebesar Rp14.727.640.761,00. Nilai tersebut merupakan saldo Dana Bergulir yang belum disajikan berdasarkan hasil inventarisasi secara memadai dan belum disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.II.2) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Investasi Permanen per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp31.659.397.497,00 dan sebesar Rp29.604.487.964,00. Dalam nilai tersebut sebesar Rp827.272.908,00 berupa penyertaan modal pada PD Ita Esa tidak disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai investasi penyertaan modal pada PD Ita Esa.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.III atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.158.180.273.538,65 dan sebesar Rp1.060.438.432.867,65. Dalam nilai tersebut, terdapat aset tetap tanah dan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang masih bernilai Rp0,00 atau Rp1,00, dan aset tetap dengan kondisi rusak dan tidak diketahui keberadaannya pada enam SKPD senilai Rp2.280.622.361,00. Terdapat 291

bidang tanah belum dapat dibuktikan dokumen kepemilikannya. Selain itu, nilai Aset Tetap tersebut belum didukung dengan proses inventarisasi yang memadai secara menyeluruh dan reklasifikasi atas barang rusak/tidak digunakan ke Aset Lainnya sebesar Rp2.880.612.520,00 belum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.2.V. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp273.845.737,00 dan sebesar Rp894.481.494,00. Dalam nilai tersebut belum termasuk Utang PFK sebesar Rp240.216.579,17 atas pungutan PPh dan PPN yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD. Selain itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI untuk menelusuri saldo awal atas Kewajiban minimal sebesar Rp3.716.226.649,00 berupa pungutan pajak yang ditampung sebelum disetorkan ke Kas Negara dalam rekening titipan pajak. Atas pengelolaan rekening tersebut terdapat selisih penyetoran pajak sebesar Rp355.819.622,00 dan jasa giro dari rekening penampungan pajak belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp77.316.015,00. Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Kewajiban tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.2.I.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan Belanja Pegawai per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp239.074.326.643,00 dan sebesar Rp219.750.586.450,00. Dalam nilai tersebut, terdapat realisasi sebesar Rp299.228.688,39 atas pembayaran honorarium/insentif pemungutan pajak, pemungutan retribusi, insentif PBB dan insentif atas pelampauan target PBB TA 2013 yang belum dibayarkan kepada yang berhak dan Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan atas dana tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip substansi mengungguli bentuk formal dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak belum dibayarkannya Belanja Pegawai kepada yang berhak sebesar Rp299.228.688,39 dan belum disetorkannya pungutan pajak ke Kas Negara sebesar Rp240.216.579,17 serta menyajikan Dana Bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mencatat Persediaan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun, menyajikan penyertaan modal pada PD Ita Esa sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen dan melakukan inventarisasi Aset Tetap yang memadai secara menyeluruh dan didukung dengan dokumen yang memadai, Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Desember 2014, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 40.b/LHP/XIX.KUP/08/2015 dan Laporan Nomor 40.c/LHP/XIX.KUP/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 24 Agustus 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan



Ali Wardhana, S.E., M.M., Ak., C.A.
Akuntan Reg. Neg. No. D-12.057



BUPATI ROTE NDAO

Ba'a, 1 Juni 2015

Nomor : 900 / 488.a / VI / 2015
Lampiran : -
Hal : Surat Representasi
Manajemen

Kepada
Yth. Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, Laporan Arus Kas, Neraca per 31 Desember 2014, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

8. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
9. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi sebelum tanggal 31 Desember 2014 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
10. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
11. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
12. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
13. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
14. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
15. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
16. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.



BUPATI ROTE NDAO, j

Drs. LEONARD HANING, MM



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

REK	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	528.769.454.292,00	521.892.692.630,18	98,84	491.276.736.920,96
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.709.142.553,00	25.072.666.421,18	90,49	17.646.843.269,96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.733.418.456,00	4.492.674.831,38	94,91	3.335.712.278,19
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.088.148.000,00	5.755.412.893,00	81,20	5.314.635.775,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.002.491.804,00	6.002.491.804,00	100,00	5.320.183.700,91
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.885.084.293,00	8.822.086.892,80	89,25	3.676.311.515,86
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	500.246.111.739,00	496.005.826.209,00	99,15	472.029.893.651,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	455.043.346.359,00	459.540.119.656,00	100,99	445.393.870.722,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	9.004.662.029,00	13.742.174.650,00	152,61	16.530.677.863,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	881.801.330,00	641.062.006,00	72,70	459.366.859,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	361.623.423.000,00	361.623.423.000,00	100,00	345.248.896.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	83.533.460.000,00	83.533.460.000,00	100,00	83.154.930.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	36.898.412.000,00	28.232.164.000,00	76,51	23.416.343.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	36.898.412.000,00	28.232.164.000,00	76,51	23.416.343.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	8.304.353.380,00	8.233.542.553,00	99,15	3.219.679.929,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	8.304.353.380,00	8.233.542.553,00	99,15	3.219.679.929,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	814.200.000,00	814.200.000,00	100,00	1.600.000.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	814.200.000,00	814.200.000,00	100,00	1.600.000.000,00
2	BELANJA	560.262.417.737,84	484.182.401.434,00	86,42	475.572.480.825,00
2.1	BELANJA OPERASI	429.178.614.204,84	378.022.141.480,00	88,08	365.446.420.715,00
2.1.1	Belanja Pegawai	268.602.003.919,84	239.074.326.643,00	89,01	219.750.586.450,00
2.1.2	Belanja Barang	117.496.950.963,00	98.086.331.637,00	83,48	93.019.189.961,00
2.1.5	Belanja Hibah	4.058.500.000,00	4.008.390.000,00	98,77	14.848.266.100,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.880.000.000,00	6.060.045.500,00	76,90	5.566.426.750,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	31.141.159.322,00	30.793.047.700,00	98,88	32.261.951.454,00
2.2	BELANJA MODAL	128.815.292.504,00	104.480.817.979,00	81,11	108.893.260.110,00
2.2.1	Belanja Tanah	1.642.874.325,00	1.507.438.650,00	91,76	135.000.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	24.481.925.864,00	22.034.701.705,00	90,00	18.347.671.078,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	38.593.220.054,00	23.196.050.196,00	60,10	33.229.083.171,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.051.125.761,00	57.696.483.428,00	90,08	56.920.116.361,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	46.146.500,00	46.144.000,00	99,99	261.389.500,00

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
2	3		5	6
BELANJA TAK TERDUGA	2,268,511,029.00	1,679,441,975.00	74.03	1,232,800,000.00
Belanja Tak Terduga	2,268,511,029.00	1,679,441,975.00	74.03	1,232,800,000.00
TRANSFER	0.00	0.00		0.00
Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00		0.00
SURPLUS / (DEFISIT)	(31,492,963,445.84)	37,710,291,196.18	(122.09)	15,704,256,095.96
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	33,992,963,445.84	32,937,875,945.84	96.90	19,288,707,349.88
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	32,492,963,445.84	32,492,963,445.84	100.00	18,381,389,349.88
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,500,000,000.00	444,912,500.00	29.66	907,318,000.00
PENGELUARAN DAERAH	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	100.00	2,500,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	100.00	2,500,000,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah				
PEMBIAYAAN NETTO	31,492,963,445.84	30,437,875,945.84	96.65	16,788,707,349.88
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	68,148,167,142.02		32,492,963,445.84

Baa. 31 Desember 2014
 BUPATI ROTE NDAO

 LEONARD HANING, MM



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2014	2013	Bertambah/ (Berkurang)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	67.320.583.403,02	31.843.617.208,84	35.476.966.194,18
Kas Di Bendahara Penerimaan	738.284.194,00	25.249.950,00	713.034.244,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	827.583.739,00	649.749.372,00	177.834.367,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	47.551.555,00	199.306.355,00	(151.754.800,00)
Piutang Pajak	3.084.155.680,16	654.978.473,78	2.429.177.206,38
Piutang Retribusi	161.575.250,00	183.817.750,00	(22.242.500,00)
Piutang Lain-lain	7.590.061.757,30	7.400.565.324,30	189.496.433,00
Persediaan	11.182.345.450,74	12.826.757.691,28	(1.644.412.240,54)
JUMLAH ASET LANCAR	90.952.141.029,22	53.784.042.125,20	37.168.098.904,02
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen Lainnya	14.282.728.261,00	14.727.640.761,00	(444.912.500,00)
JUMLAH Investasi Non Permanen	14.282.728.261,00	14.727.640.761,00	(444.912.500,00)
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31.659.397.497,00	29.604.487.964,00	2.054.909.533,00
JUMLAH Investasi Permanen	31.659.397.497,00	29.604.487.964,00	2.054.909.533,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	45.942.125.758,00	44.332.128.725,00	1.609.997.033,00
ASET TETAP			
Tanah	47.276.937.982,00	45.859.499.332,00	1.417.438.650,00
Peralatan dan Mesin	156.867.972.340,49	141.561.317.675,49	15.306.654.665,00
Gedung dan Bangunan	346.325.589.403,01	326.851.160.126,01	19.474.429.277,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	578.144.927.861,15	519.183.642.726,15	58.961.285.135,00
Aset Tetap Lainnya	16.055.168.386,00	15.492.385.043,00	562.783.343,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.509.677.566,00	11.490.427.965,00	2.019.249.601,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.158.180.273.538,65	1.060.438.432.867,65	97.741.840.671,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	640.770.000,00	442.000.000,00	198.770.000,00
Aset Lain-lain	3.861.116.877,13	3.450.865.483,01	410.251.394,12
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	35.576.947.230,50	33.778.851.710,50	1.798.095.520,00
JUMLAH ASET LAINNYA	40.168.834.107,63	37.671.717.193,51	2.497.116.914,12
JUMLAH ASET	1.335.243.374.433,50	1.196.226.320.911,36	139.017.053.522,14

URAIAN	2014	2013	Bertambah/ (Berkurang)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	47,551,555.00	97,769,519.00	(50,217,964.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	119,430,000.00	164,970,000.00	(45,540,000.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	106,864,182.00	631,741,975.00	(524,877,793.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	273,845,737.00	894,481,494.00	(620,635,757.00)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00
Utang Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	273,845,737.00	894,481,494.00	(620,635,757.00)
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	68,148,167,142.02	32,492,963,445.84	36,393,487,890.18
Cadangan Untuk Piutang	10,835,792,687.46	8,239,361,548.08	2,596,431,139.38
Cadangan Untuk Persediaan	11,182,345,450.74	12,826,757,691.28	(1,644,412,240.54)
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(106,864,182.00)	(631,741,975.00)	524,877,793.00
Pendapatan yang Ditangguhkan	738,284,194.00	127,189,921.00	(127,189,921.00)
Barang/Jasa yang masih harus diserahkan	(119,430,000.00)	(164,970,000.00)	45,540,000.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	90,678,295,292.22	52,889,560,631.20	37,788,734,661.02
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	45,942,125,758.00	44,332,128,725.00	1,609,997,033.00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1,158,180,273,538.65	1,060,438,432,867.65	97,741,840,671.00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	40,168,834,107.63	37,671,717,193.51	2,497,116,914.12
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1,244,291,233,404.28	1,142,442,278,786.16	101,848,954,618.12
EKUITAS DANA CADANGAN			
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA	1,334,969,528,696.50	1,195,331,839,417.36	139,637,689,279.14
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,335,243,374,433.50	1,196,226,340,911.36	139,017,053,522.14

Baa, 31 Desember 2014

Bupati Rote Ndao



Dis. LEONARD HANING, MM



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN 2013

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk:		
3	Pendapatan Pajak Daerah	4,492,674,831.38	3,335,712,278.19
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5,755,412,893.00	5,314,635,775.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,002,491,804.00	5,320,183,700.91
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,624,672,172.80	3,169,186,775.86
7	Dana Bagi Hasil Pajak	13,742,174,650.00	16,530,677,863.00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	641,062,006.00	459,366,859.00
9	Dana Alokasi Umum	361,623,423,000.00	345,248,896,000.00
10	Dana Alokasi Khusus	83,533,460,000.00	83,154,930,000.00
11	Dana Penyesuaian	28,232,164,000.00	23,416,343,000.00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	8,233,542,553.00	3,219,679,929.00
13	Pendapatan Lainnya	814,200,000.00	1,600,000,000.00
14	Jumlah Arus Kas Masuk	521,695,277,910.18	490,769,612,180.96
15			
16	Arus Kas Keluar:		
17	Belanja Pegawai	239,309,631,161.00	219,923,258,960.00
18	Belanja Barang	98,403,374,115.00	93,024,402,258.00
19	Belanja Subsidi	0.00	0.00
20	Belanja Hibah	4,008,390,000.00	16,787,403,475.00
21	Belanja Bantuan Sosial	6,080,045,500.00	5,566,426,750.00
22	Belanja Bantuan Keuangan	30,793,047,700.00	32,261,951,454.00
23	Belanja Tak Terduga	1,679,441,975.00	1,232,800,000.00
24	Jumlah Arus Kas Keluar	380,273,930,451.00	368,796,242,897.00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	141,421,347,459.18	121,973,369,283.96
26			
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		
28	Arus Kas Masuk:		
29	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
30	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	97,414,720.00	476,719,940.00
31	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	100,000,000.00	100,000,000.00
32	Pendapatan Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
33	Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
34	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0.00	30,404,800.00
35	Jumlah Arus Kas Masuk	197,414,720.00	507,124,740.00
36			
37	Arus Kas Keluar:		
38	Belanja Tanah	1,507,438,650.00	135,000,000.00
39	Belanja Peralatan dan Mesin	22,199,077,946.00	18,347,671,078.00
40	Belanja Bangunan dan Gedung	23,033,461,105.00	33,229,293,171.00
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57,723,017,928.00	56,920,116,361.00
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	46,144,000.00	261,389,500.00
43	Belanja Aset Lainnya		
44	Jumlah Arus Kas Keluar	104,509,139,629.00	108,893,470,110.00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(104,311,724,909.00)	(108,386,345,370.00)
46			

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013
47	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
48	Arus Kas Masuk:		
49	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	444,912,500.00	907,318,000.00
50	Jumlah Arus Kas Masuk	444,912,500.00	907,318,000.00
51			
52	Arus Kas Keluar:		
53	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
54	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00
55	Jumlah Arus Kas Keluar	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(2,055,087,500.00)	(1,592,682,000.00)
57			
58			
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
60	Arus Kas Masuk:		
61	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31,573,964,202.00	30,705,538,541.91
62	Penerimaan setoran sisa UP	736,060,218.00	575,755,553.00
63	Penerimaan setoran sisa TUP	1,429,156,147.00	214,388,650.00
64	Setoran Pengembalian Belanja	244,847,981.00	2,068,805,164.00
65	Jumlah Arus Kas Masuk	33,984,028,548.00	33,564,487,908.91
66			
67	Arus Kas Keluar:		
68	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31,574,367,337.00	30,705,615,041.91
69	Sisa UP Tahun Berjalan	501,098,243.00	536,550,084.00
70	Sisa TUP Tahun Berjalan	1,466,131,824.00	349,414,800.00
71	Jumlah Arus Kas Keluar	33,561,597,404.00	31,591,579,925.91
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	422,431,144.00	1,972,907,983.00
73			
74	Kenalkan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	35,476,966,194.18	13,967,249,896.96
75	Saldo Awal Kas di BUD	31,843,617,208.84	17,876,367,311.88
76	Saldo Akhir Kas di BUD	67,320,583,403.02	31,843,617,208.84
77	Kas Di Bendahara Penerimaan	738,284,194.00	25,249,950.00
78	Kas Di Bendahara Pengeluaran	827,583,739.00	491,566,898.00
79	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		0.00
80	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	47,551,555.00	199,306,355.00
81	Saldo Akhir Kas	68,934,002,891.02	32,559,740,411.84

Baa, 31 Desember 2014

